

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENYIARAN RADIO  
BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2002 TENTANG PENYIARAN**

(Studi Di Wilayah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)

**SKRIPSI**

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam

Ilmu Hukum

Oleh :

**DIMAS ADITYA NUGRAHA**

**145010101111092**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENYELENGARAAN PENYIARAN RADIO  
BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2002 TENTANG PENYIARAN** (Studi Di Wilayah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah  
Jawa Timur)

**OLEH:**

**DIMAS ADITYA NUGRAHA**

**145010101111092**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis penguji pada tanggal:

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Dr. Istislam SH., M.H.**

**NIP. 196208051988021001**

**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196008101986011002**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian**

**Hukum Administrasi Negara**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196008101986011002**

**Dr. Rachmad Safa'at.SH.,M.Si**

**NIP. 196208051988021001**



## HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul Skripsi** : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN  
PENYELENGGARAAN PENYIARAN  
BERDASARKAN PASAL 34 AYAT (4)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN  
2002 TENTANG PENYIARAN (STUDI DI  
WILAYAH KOMISI PENYIARAN  
INDONESIA DAERAH JAWA TIMUR)**

**Identitas Penulis** :

**a. Nama** : **Dimas Aditya Nugraha**

**b. NIM** : **145010101111092**

**Konsentrasi** : **Hukum Administrasi Negara**

**Jangka Waktu Penelitian** : **6 Bulan**

**Di Setujui Pada Tanggal** :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

**Dr. Istislam SH., M.H.**

**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196208051988021001**

**NIP. 196008101986011002**

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Administrasi Negara

**Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196008101986011002**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan skripsi ini dengan judul EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (Studi di Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur)

Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak. Dengan rasa syukur atas selesainya laporan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT karena atas karunia-Nya laporan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.
2. Kedua Keluarga penulis, Bapak Syahrul, ibu Sri Ningsih dan Ade Auliya Aisha Putri yang senantiasa memberi doa restu, motivasi, semangat, dan dukungan bagi penulis untuk menyelesaikan laporan ini.
3. Bapak Dr. Rachmad Safa'at SH.M.Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
4. Bapak Dr.Istislam SH.MH sebagai dosen utama dan Bapak Lutfi Effendi SH.M.Hum sebagai dosen pendamping atas bimbingannya dan motivasinya.
5. Bapak Bashlul Hazzami, ibu henny, ibu Sri yang bertugas di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi guna menyelesaikan laporan ini.
6. Teman-teman seperjuangan khusus kalian yang banyak memberikan dorongan dan semangat alfredo, Kendra, alam, ghani, lukyjo, denis, wildan, wira, faza, lambert.
7. Amelya Yustiana Putri selaku pendamping sekaligus motivator yang luar biasa.
8. Mie sedap indomie dan kopi kapiten yang telah banyak memberi asupan ketika waktu bosan.
9. Teman-teman angkatan 2014 semua yang selalu memberikan kritik dan saran untuk laporan ini.
10. Teman-teman LEGAL arba, intan, albina, guntur, vans, habiba, fahmi arab, wisha, ima, zipora.
11. Teman-teman kosan arya, aries, muklis, Rahman, alifin mas hafiz, pak surapin selaku pemilik kosan.

Penulis menyadari bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki, sehingga masih terdapat banyak kekurangan dari laporan ini. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan membangun diharapkan agar laporan ini menjadi baik dan benar serta pemicu bagi penulis lain untuk menghasilkan yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada pembaca dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Malang, ..... 2018

Dimas Aditya Nugraha

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>viii</b>
 <b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tinjauan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Sistematika Penulisan.....	14
 <b>BAB II    KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Umum Izin .....	16
B. Kajian Umum Radio .....	23
a. Penerimaan .....	23
b. Loss/Kehilangan.....	24
c. Pantulan.....	24
C. Kajian Umum Efektifitas .....	28
D. Kajian Tentang Penegakan Hukum .....	31
 <b>BAB III   METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian .....	35
C. Alasan Pemilihan Lokasi.....	36
D. Sumber Data.....	37
1. Data Primer .....	37
2. Data Sekunder.....	37
E. Teknik Pengumpulan/Pengambilan Data .....	38
F. Populasi Dan Sampel .....	39

G. Teknik Analisis Data.....	40
H. Definisi Operasional.....	41

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum .....	43
1. Gambaran Umum Jawa Timur.....	43
a. Kondisi Geografis .....	43
b. Kondisi Sosial.....	44
2. Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia .....	46
a. Gambaran Umum Instansi .....	46
b. Visi dan Misi .....	47
c. Tugas dan Kewajiban KPID .....	48
d. Fungsi dan Wewenang KPID .....	49
B. Efektifitas Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	53
C. Hambatan Efektifitas Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	77
D. Solusi Efektifitas Pasal 34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran .....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	82
B. Solusi.....	84
C. Saran.....	84

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>.....</b>
-----------------------	--------------

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Orisinalitas Penelitian .....	10
Tabel 2 Lembaga Penyiaran Radio Swasta.....	59





## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 1 Struktur Organisasi KPID Jawa Timur .....	53
--	----



## RINGKASAN

Dimas Aditya Nugraha Nim : 145010101111092, EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PASAL 34 AYAT (4) UNDANG-UDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAN (studi di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur) Dosen pembimbing utama Dr. Istislam SH.MH dan Dosen pendamping Bapak Lutfi Effendi SH.M.Hum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana efektifitas pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran di wilayah Jawa Timur. Dalam Pasal 34 ayat (4) mengatur tentang izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan oleh pihak manapun. Peraturan ini dibuat untuk mengatur izin penyelenggaraan penyiaran dalam melakukan penyiarannya tidak melanggar tujuan dari Pancasila dan UUD RI 1945 serta tidak merugikan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini mengangkat dua rumusan masalah yaitu bagaimana efektifitas Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Apa saja hambatan dan solusi terhadap penerapan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis yang dilakukan dengan cara penelitian langsung untuk memperoleh data mengenai izin sesuai dengan pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa efektifitas Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sudah efektif karena untuk di wilayah Jawa Timur tidak ada hal yang melanggar sesuai ketentuan.

## SUMMARY

*Dimas Aditya Nugraha Nim: 145010101111092, IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS OF ARTICLE 34 VERSES (4) NUMBER 32 OF 2002 CONCERNING BROADCASTING (study at the Indonesian Broadcasting Commission in East Java) Dr. Istislam SH.MH and Assistant Lecturer Mr. Lutfi Effendi SH.M.Hum.*

*This study aims to determine how effective Article 34 paragraph (4) of Law Number 32 of 2002 concerning broadcasting in the East Java region. Article 34 paragraph (4) regulates broadcasting permit permits are prohibited by any party. This regulation was made to regulate broadcasting permits in broadcasting it does not violate the objectives of Pancasila and the 1945 Constitution of 1945 and does not harm the public.*

*Based on this, this thesis raises two formulations of the problem, namely how the effectiveness of Article 34 paragraph (4) of Law Number 32 of 2002 concerning broadcasting. What are the obstacles and solutions to the application of Article 34 paragraph (4) of Law Number 32 of 2002 concerning broadcasting.*

*The type of this research is an empirical juridical type with sociological juridical approach method which is done by direct research to obtain data regarding permits in accordance with article 34 paragraph (4) of Law Number 32 of 2002 concerning broadcasting.*

*In this study it can be seen that the effectiveness of Article 34 paragraph (4) of Law Number 32 of 2002 concerning broadcasting has been effective because there is nothing in the East Java region that violates the provisions.*

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mengakui, menjamin dan melindungi kemerdekaan menyatakan pendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi, yang bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis yang sesuai cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, maka kemerdekaan yang dimaksud adalah kemerdekaan yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Pada Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>1</sup>

Dalam menjaga integrasi secara nasional, menegakkan nilai-nilai agama, keadilan, kebenaran, tata susila, moral, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut kebebasan wajib dilaksana dengan rasa tanggung jawab, selaras,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 F

seimbang antara kebebasan dan kesetaraan dalam menggunakan hak berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup>Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjadi penyaring dari era globalisasi yang masuk di Indonesia.

Era globalisasi pada saat ini juga ditandai dengan arus informasi yang mengalir begitu cepat yang sejalan dengan kemajuan teknologi saat ini. Kemajuan teknologi yang sangat pesat dari teknologi informasi seperti halnya perangkat keras (Hardware), perangkat lunak (Software), dan teknologi informasi lainnya yang telah membuat suatu tujuan dalam bentuk institusi tersebut dimana ingin dicapai secara maksimal. Sebuah sistem pada suatu institusi / organisasi yang kurang mendapatkan akses informasi akan berdampak pada institusi atau organisasi tersebut akan tertinggal, oleh karena itu sebuah institusi atau organisasi harus memerlukan sistem untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyalurkan informasi. Dalam hal ini guna mencapai kebutuhan yang di butuhkan oleh suatu instansi atau organisasi tersebut harus memiliki kriteria informasi yang bermutu baik, salah satunya adalah memiliki keakuratan yang tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka hal yang sangat penting pula dilakukan oleh institusi atau organisasi salah satunya adalah pemanfaatan teknologi informasi

---

<sup>2</sup>Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139

untuk menghadapi era globalisasi saat ini yaitu menjaga dan meningkatkan kesadaran akan taat hukum serta disiplin nasional, menyalurkan pendapat serta aspirasi umum dan juga mendorong peran aktif masyarakat. Disamping itu juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan mutu sistem.

Manusia sebagai *homo-socius* diberikan kemampuan untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya atau disebut lingkungan sosial tidak hanya dalam lingkup lingkaran kecil kekerabatan saja, namun juga dalam pemanfaatan potensi yang tersedia di alam raya. Tata cara komunikasi yang dilakukan oleh manusia memiliki riwayat tumbuh kembang yang sangat panjang serta beraneka ragam, sejak zaman pra sejarah hingga perkembangan era teknologi informasi yang ada saat ini.

Perkembangan teknologi komunikasi telah melahirkan masyarakat kaya akan informasi yang memiliki tuntutan semakin besar dalam hak untuk mengetahui dan dalam halnya kepemilikan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat. Informasi kini telah berubah menjadi *lifestyle* atau gaya hidup kebutuhan pokok masyarakat dan menjadi urgent *comodity* masyarakat yang berbangsa dan bernegara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membawa dampak yang cukup besar terhadap dunia penyiaran, termasuk juga penyiaran di Indonesia. Sebagai penyalur informasi serta pembentuk pendapat umum, penyiaran memiliki peranan yang sangat strategi terutama dalam halnya pengembangan alam demokrasi di Indonesia.

Salah satu sarana yang dapat digunakan dalam berkomunikasi bagi masyarakat, lembaga penyiaran, dunia bisnis, pemerinah adalah penyiaran. Selama ini landasan hukum dan pengaturan penyiaran yang ada belumlah cukup memadai sehingga hal tersebut telah menyebabkan perkembangan bagi sistem penyiaran komunikasi di Indonesia. Masyarakat memiliki peran serta dalam menyelenggarakan sebagian tugas-tugas umum pemerintahan, khususnya di bidang penyelenggaraan penyiaran, tidak dapat terlepas dari kaidah-kaidah umum penyelenggaraan telekomunikasi yang berlaku secara universal.<sup>3</sup>

“Terdapat permasalahan krusial di Indonesia<sup>4</sup>, yakni Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah keberadaannya seringkali terabaikan. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran, diterangkan dalam pasal 14 ayat (1) yang menyatakan: Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan: Di daerah provinsi, kabupaten, atau kota dapat didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.

---

<sup>3</sup>ibid

<sup>4</sup>Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran



LPP” Lokal harus bisa berfungsi untuk mencerdaskan bangsa, dan harus bisa menjadi ruang publik karena frekuensi adalah ranah publik. Untuk berbicara dalam konsep pemberdayaan LPP Lokal, tidak akan terlepas dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.<sup>5</sup> Kemudian KPID akan bertindak tegas dalam pengawasan isi siaran LPP Lokal. Spektrum frekuensi radio merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien guna memperoleh manfaat yang optimal dengan memperhatikan kaidah hukum nasional maupun internasional. Penggunaan spektrum frekuensi radio harus sesuai dengan peruntukannya serta tidak saling mengganggu mengingat sifat spektrum frekuensi radio dapat merambat ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran menyatakan, *Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang atau satu badan hukum, baik di satu wilayah siaran maupun di beberapa wilayah siaran, dibatasi*. Dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang menyatakan, *Izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain*.

---

<sup>5</sup>Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik



Dalam melakukan penyiaran radio swasta, stasiun radio swasta harus mempunyai izin yang diberikan oleh menteri dari rekomendasi Komisi Penyiaran Indonesia selanjutnya disebut KPI. Dalam penyiaran radio swasta setiap stasiun radio harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia KPI, KPI adalah lembaga independen yang mengatur tentang berbagai mengenai penyiaran. KPI sebagai bentuk wujud peran masyarakat dalam penyiaran. Kewenangan dan tugas KPI diatur pada Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Secara umum penyiaran radio swasta diatur dalam Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran, dalam penyiaran tersebut dibagi menjadi 4 (empat) lembaga penyiaran yaitu:<sup>6</sup>

- a. Lembaga Penyiaran Publik
- b. Lembaga Penyiaran Swasta
- c. Lembaga Penyiaran Komunitas
- d. Lembaga Penyiaran berlangganan

Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Lembaga penyiaran swasta adalah lembaga penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa

---

<sup>6</sup> Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 139.

penyiaran radio atau televisi. Lembaga penyiaran komunitas adalah lembaga yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, dengan daya pancar yang rendah, luas jangkuan wilayah terbatas, serta melayani kepentingan komunitas lainnya. Lembaga penyiaran berlangganan adalah lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Di wilayah Jawa Timur masih ada lembaga penyiaran swasta yang izinnya tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang lembaga penyelenggaraan penyiaran swasta ataupun Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Beberapa tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan izin tertulis kepada menteri melalui KPI, dengan melampirkan persyaratan administrative, program siaran, data dan teknik penyiaran
- 2) Melengkapi apabila permohonan izin diberikan masih belum lengkap
- 3) Dilakukan evaluasi untuk menerbitkan kelayakan penyelenggaraan penyiaran

- 4) Forum rapat bersama untuk hasil terakhir diselenggarakannya pemberian persetujuan penolakan izin penyelenggaraan penyiaran melalui penilaian bersama dari KPI yang di terbitkan oleh menteri

Untuk di Jawa Timur sendiri praktek izin penyelenggaraan dipindahtangankan kepada pihak lain tidak ada, melainkan yang terjadi di Jawa Timur adanya perubahan saham oleh satu stasiun radio swasta oleh stasiun radio swasta lainnya.<sup>7</sup> Hal ini dikarena beberapa faktor yaitu: yang pertama stasiun radio tersebut hampir gulung tikar atau bangkrut agar stasiun radio tersebut mendapat dana segar stasiun radio tersebut menjual beberapa lembar saham perusahaan demi stasiun radio tersebut tetap berjalan, yang kedua yaitu adanya perubahan struktur organisasi dalam perusahaan tersebut karena adanya perubahan kepengurusan maka lahir juga ketertiban atau kebijakan-kebijakan baru dari pengurus yang baru.

Sebagai salah satu contoh MNC Radio Network adalah pemilik MNC Trijaya FM yang masih dibawah naungan SCFM (Surabaya Cakra FM) karena pemegang saham dari MNC Trijaya FM pemilik dari SCFM. Hal ini sudah dijelaskan saat mendapatkan izin penyiaran keadaan – keadaan seperti itu sudah menjelaskan bahwa ada ketidakefektifan dalam pasal

---

<sup>7</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu heny bagian bidang perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur

34 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengukur efektifitas pasal 34 Ayat

(4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran.



Tabel orisinalitas Penelitian

no	Tahun penelitian	Nama peneliti	Judul penelitian	Rumusan masalah	Keterangan
1	2016	Mohamad Yudharis	Izin penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta	<p>1. Bagaimana efektifitas pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta terkait izin penyiaran televisi swastalokal?</p> <p>2. Apa saja hambatan dan solusi terhadap penerapan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran swasta terkait</p>	Skripsi

				penyelenggaraan penyiaran televisi swastalokal?	
2	2009	Hukeria Harianja	Penyalagunaan izin radio dan akibat hukumnya berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002	1. apakah syarat-syarat dan prosedur mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang berlaku? 2. bagaimanakah upaya pencegahan yang dilakukan balai monitoring terhadap penyalahgunaan penyelenggara izin penyiaran?	Skripsi

Pembeda dari penelitian terdahulu dan penelitian yang saya lakukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran

swasta, sedangkan pada penelitian yang sekarang lakukan lebih fokus ke Undang-Undang No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran.

2. Dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada pengawasan stasiun radio, sedangkan pada penelitian sekarang lebih fokus kepada stasiun radio sudah memiliki izin atau belum.
3. Dalam penelitian terdahulu membahas tentang hambatan yang muncul saat memperoleh perizinan TV, sedangkan penelitian sekarang membahas hambatan yang terjadi pada saat memperoleh izin penyiaran radio.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektifitas pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran terkait izin penyelenggaraan penyiaran radio swasta?
2. Apa saja hambatan penerapan pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran terkait izin penyelenggaraan penyiaran radio swasta?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang hendak penulis akan diteliti tersebut seperti yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui efektifitas pasal Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terkait penyelenggaraan penyiaran radio.

2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dari penerapan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran terkait penyelenggaraan penyiaran radio.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Untuk menganalisis cara penerapan peraturan terkait penyelenggaraan penyiaran radio, menganalisis hambatan dan mengetahui solusi atas masalah dalam penerapan Undang-Undang.
- b. Dapat dijadikan sebagai suatu dalam mengatasi suatu hambatan dalam penegakan Peraturan terkait penyelenggaraan penyiaran radio.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Pemerintah untuk mengatur dan mengetahui bagaimana penggunaan izin yang baik sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta.
- b. Bagi Masyarakat untuk mengetahui bagaimana upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan penyiaran.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **1. BAB I : PENDAHULUAN**



Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

## 2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini memuat kajian pustaka berkaitan dengan kerangka teori tentang efektifitas Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terkait izin penyelenggaraan penyiaran radio.

## 3. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat jenis penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data teknik analisis data, dan definisi operasional.

## 4. BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini penulis membahas efektifitas pasal 34 ayat (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran terkait izin penyelenggaraan penyiaran radio.

## 5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan secara singkat kesimpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya bab ini memberikan sarana yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian umum Izin

“Pengertian Perizinan Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga<sup>1</sup>. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti sempit maupun luas :<sup>2</sup>

*Izin dalam arti luas* yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang. *Izin dalam arti sempit* yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pada umumnya sistem izin terdiri dari:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hal 2-3

<sup>3</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 196-197

- 1) Larangan
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin)
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin. Terdapat istilah lain yang memiliki kesejajaran dengan izin yaitu :<sup>4</sup>
  - a) Dispensasi ialah keputusan administrasi Negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Sehingga suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu yang istimewa (relaxation legis).
  - b) Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
  - c) Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya bisa berupa kontraktual atau kombinasi antara lisensi

---

<sup>4</sup>Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm. 17-18

dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.

a. Motif dan Tujuan Perizinan

Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas pemerintah terkait ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi kewenangan. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu :<sup>5</sup>

1. Dari sisi pemerintah

Untuk melaksanakan peraturan. Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Sebagai sumber pendapatan daerah. Dengan adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan.”

2. Dari sisi masyarakat

---

<sup>5</sup>Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 200

Untuk adanya kepastian hukum, Untuk adanya kepastian hak, Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin. Dengan mengikat tindakan-tindakan pada suatu system perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin. Adapun motif-motif untuk menggunakan system izin dapat berupa:<sup>6</sup>Mengendalikan perilaku warga, Mencegah bahaya bagi lingkungan hidup, Melindungi objek-objek tertentu, Membagi sumber daya yang terbatas, Mengarahkan aktivitas Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat *unsur-unsur* antara lain:<sup>7</sup>*Instrumen yuridis* Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya. *Peraturan perundang-undangan* Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas

---

<sup>6</sup>Philipus M. Hadjon, *op.cit*, hlm. 4.

<sup>7</sup>Adrian Sutedi, *op.cit*, hlm.201-202.

legalitas, tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan Perundang – undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. *Organ pemerintah* adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. *Peristiwa konkret* izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu.

b. Prosedur Pemberian Izin

Proses dan prosedur perizinan Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur

perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai: sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas. Persyaratan Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.<sup>8</sup> *Konstitutif* yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. *Kondisional* artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi. permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria: Disebutkan dengan jelas, Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin, Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

c. Pengawasan Izin

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 187



Sistem pengawasan yang efektif adalah sarana terbaik untuk membuat segalasesuatunya berjalan dengan baik dalam Administrasi Negara. Pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.<sup>9</sup> Menurut Sujamto tujuan pengawasan adalah :<sup>10</sup>

- 1) Sebagai suatu tindakan pencegahan, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, jadi pengawasan itu tidak harus setelah terjadinya atau adanya dugaan akan terjadi suatu pelanggaran.
- 2) Untuk mengetahui terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang telah dibuat oleh administrasi Negara. Sementara itu kegunaan dari pengawasan adalah:<sup>11</sup> Untuk mendukung penegakkan hukum, Warga masyarakat dapat menilai bahwa penguasa memang sungguh-sungguh menegakkan Peraturan Perundang – undangan, Para pegawai yang bertugas melakukan pengawasan dapat melalui penerangan (penyuluhan), anjuran(bujukan), peringatan dan nasehat. Dalam melaksanakan pengawasan perizinan, aparatur

---

<sup>9</sup>S.Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 84.

<sup>10</sup>Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 201.

<sup>11</sup>*Ibid*

pemerintah diberikan arahan mengenai prinsip-prinsip pelayanan perizinan antara lain kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu akurasi keamanan dan tanggung jawab.

## **B. Kajian umum Radio**

Radio merupakan sebuah teknologi komunikasi dengan cara mengirimkan sinyal melalui gelombang elektromagnetik<sup>12</sup>. Teknologi komunikasi saat ini yang sudah sangat canggih sekalipun tetap menggunakan konsep-konsep dari gelombang radio tersebut. Bahkan para astronot agar bisa tetap berkomunikasi dengan bumi menggunakan sinyal radio karena gelombang elektromagnetik bisa merambat di ruang hampa udara. Gelombang radio tercipta ketika sebuah objek yang bermuatan listrik di modulasi atau ditingkatkan frekuensinya. Sehingga kita mengenal satuan frekuensi untuk radio yang paling kecil ialah 10 Hertz sampai yang paling tinggi 10 giga hertz. Sebenarnya gelombang elektromagnetik tidak hanya radio, ada gelombang lain yang lebih tinggi tingkat frekuensinya yaitu sinar gamma, ultraviolet, X ray,

---

<sup>12</sup>Lina, herlina, 2014, radio frekuensi <https://lherlina.wordpress.com/2014/11/28/radio-frekuensi/> (28 November 2014)

inframerah. Terdapat beberapa sifat radio yang umum dan sering didengar yaitu:<sup>13</sup>

a. Penerimaan

Suatu keadaan atau kondisi yang dapat membuat pertambahan dalam amplitudo sebuah signal RF. Sebuah gain dapat terbentuk dari proses aktif seperti penambahan RF amplifier atau sebuah antenna yang didisain untuk memiliki kemampuan penerimaan yang tinggi karena dapat memfokuskan beamwidth signal, selain proses aktif adapula proses yang pasif seperti signal RF yang terefleksi dan bergabung dengan signal utama sehingga memperkuat signal utama.

b. Loss/Kehilangan

Loss adalah suatu penurunan kekuatan signal yang dapat disebabkan oleh banyak faktor. Namun yang sering ditemukan dari implementasi sebuah perangkat radio biasanya terdapat pada kabel yang menyambungkan dari alat RF ke antenna beserta konektornya dan objek yang terdapat pada jalur transmisi radio tersebut. Kita harus mampu memperhitungkan sebuah loss pada rangkaian peralatan RF karena radio memiliki ambang sensitifitas atau yang biasa disebut receive sensitivity threshold dimana radio dapat membedakan signal dan noise dengan jelas.

c. Pantulan

---

<sup>13</sup>*ibid*

Gelombang radio juga akan terpantul jika gelombang tersebut bersentuhan dengan material yang cocok untuk itu. Untuk gelombang radio<sup>14</sup>, sumber utama dari pantulan adalah metal dan permukaan air. Aturan terjadinya pantulan cukup sederhana, sudut masuknya gelombang ke permukaan akan sama dengan sudut sinyal di pantulkan. Dalam pandangan gelombang radio sebuah terali besi atau sekumpulan tiang besi yang rapat sama dengan sebuah permukaan yang padat, selama jarak antar tiang lebih kecil dari panjang gelombang radionya. Sudut masuk gelombang akan sama dengan sudut dari pantulan. Sebuah bentuk parabolik akan menggunakan efek ini untuk mengkonsentrasikan gelombang radio yang tersebar dipermukaannya menuju satu tujuan.

Sejarah media penyiaran dunia dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu media penyiaran sebagai penemu teknologi dan sejarah media penyiaran sebagai suatu industri. Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi berawal dari ditemukannya radio oleh para ahli teknik di Eropa dan Amerika.

Sejarah media penyiaran sebagai penemuan teknologi maupun industri nyaris hampir sama dengan mempelajari sejarah penyiaran di Amerika Serikat. Sejarah media penyiaran dunia dimulai ketika ahli Fisika Jerman bernama Heinrich Hertz pada

---

<sup>14</sup>*ibid*

tahun 1887 berhasil mengirim dan menerima gelombang radio. Upaya *Hertz* itu kemudian dilanjutkan oleh Guglielmo Marconi (1874-1937) dari Italia yang sukses mengirimkan sinyal Morse - berupa titik dan garis- dari sebuah pemancar kepada suatu alat penerima. Sinyal yang dikirimkan Marconi itu berhasil menyeberangi Samudera Atlantik pada tahun 1901 dengan menggunakan gelombang elektromagnetik.

Sebelum Perang Dunia I meletus, Reginald Fessenden dengan bantuan perusahaan *General Electric (GE) Corporation* Amerika berhasil menciptakan pembangkit gelombang radio kecepatan tinggi yang dapat mengirimkan suara manusia juga musik. Sementara itu, tabung hampa yang ketika itu bernama audion berhasil pula diciptakan. Penemuan audion menjadikan penerimaan gelombang radio menjadi lebih muda. Radio awalnya cenderung diremehkan dan perhatian kepada penemuan baru itu hanya terpusat sebagai alat teknologi transmisi.

Radio lebih banyak digunakan oleh militer dan pemerintah untuk kebutuhan menyampaikan informasi dan berita. Radio lebih banyak dimanfaatkan para penguasa untuk tujuan yang berkaitan dengan ideologi dan politik secara umum. Pesawat radio yang pertama sekali diciptakan, memiliki bentuk yang besar dan tidak menarik serta sulit digunakan karena menggunakan tenaga listrik dan baterai berukuran besar.

Menggunakan pesawat radio ketika itu, membutuhkan kesabaran dan pengetahuan elektronik yang memadai. Tahun 1926, perusahaan manufaktur radio berhasil memperbaiki kualitas produknya. Pesawat radio sudah menggunakan tenaga listrik yang ada di rumah sehingga lebih praktis, menggunakan dua knop untuk mencari sinyal, antenna dan penampilannya yang lebih baik menyerupai peralatan furniture. Tahun 1925 sampai dengan tahun 1930, sebanyak 17 juta pesawat radio terjual kepada masyarakat dan dimulailah era radio menjadi media massa.<sup>15</sup>

Stasiun radio pertama muncul ketika seorang ahli teknik bernama Frank Conrad di Pittsburgh AS, pada tahun 1920 secara iseng-iseng sebagai bagian dari hobi, membangun sebuah pemancar radio di garasi rumahnya. Conrad menyiarkan lagu-lagu, mengumumkan hasil pertandingan olah raga dan menyiarkan instrument musik yang dimainkan putranya sendiri. Dalam waktu singkat, Conrad berhasil mendapatkan banyak pendengar seiring dengan meningkatnya penjualan pesawat radio ketika itu. Stasiun radio yang dibangun Conrad itu kemudian diberi nama KDKA dan masih tetap mengudara

---

<sup>15</sup>Dominick, Joseph, *The Dynamics of Mass Communication Media in The Digital Age*, Seventh Edition, Boston, 2002, hlm 119

hingga saat ini, menjadikannya sebagai stasiun radio tertua di Amerika dan mungkin juga di dunia.

### **C. Kajian umum Efektifitas**

Efektifitas menggambarkan keseluruhan siklus input, proses dan output yang mengacu dari hasil guna daripada suatu organisasi, program ataupun kegiatan yang menunjukkan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, serta waktu) telah dicapai. Oleh karena itu suatu organisasi, program dan kegiatan dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana dan dapat memberikan dampak, hasil atau manfaat yang diinginkan.

Penelitian efektifitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak serta manfaat yang didapat oleh program tersebut. Karena efektifitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektifitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

Hukum sebagai kaidah merupakan tolak ukur mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikir yang dogmatis. Di lain pihak ada yang melihat hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur. Metode berpikir yang digunakan yaitu induktif-empiris, sehingga hukum itu dipandang sebagai tindak yang



akan diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.<sup>16</sup>

Efektifitas berasal dari kata efek yang artinya pengaruh yang akan ditimbulkan oleh sebab, akibat atau akibat. Efektifitas yang artinya berhasil, sedangkan efektifitas menurut bahasa ketetapan guna, hasil guna, menunjang tujuan. Sedangkan, efektifitas hukum secara tata bahasa dapat berarti sebagai keberhasilangunaan hukum yang berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Bila membahas efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membahas daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis.<sup>17</sup>

Secara etimologi, “kata efektifitas berasal dari kata efektif sebagai terjemahan dari kata *effective* dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna berhasil, dan dalam bahasa belanda dikenal kata *effectief* yang memiliki makna berhasil guna”.<sup>18</sup> Secara umum, kata efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin

---

<sup>16</sup>Soekanto, Soerjono, Teori Efektifitas Dalam Hukum, Sinar Grafika, Semarang, 2000, hlm 14

<sup>17</sup>Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm. 62

<sup>18</sup>Nurul Hakim, Efektifitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga peradilan “[www.badlag.net](http://www.badlag.net).”



mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.<sup>19</sup> Dalam konteks dengan hukum maka efektifitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilan gunaan hukum, yaitu keberhasilan dalam mengimplementasikan hukum itu sendiri dalam tatanan masyarakat.

Efektifitas hukum dalam tindakan maupun realita hukum dapat diketahui jika seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil maupun gagal mencapai tujuannya, maka dari itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Efektifitas hukum akan diamati dari tujuan yang ingin dicapai. Salah satu upaya yang dilakukan agar masyarakat mentaati kaidah hukum dengan cara mencatumkan sanksi-sanksinya. Sanksi tersebut dapat berbentuk sanksi negatif maupun sanksi positif, yang maksudnya mengakibatkan rangsangan agar manusia tidak melaksanakan tindak tercela maupun melakukan tindakan yang tidak terpuji.

Teori efektifitas menurut Soerjono Soekanto yaitu:<sup>20</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

---

<sup>19</sup>Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktif Kerja, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm 24

<sup>20</sup>Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 8

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

#### **D. Kajian Tentang Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan Bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa serta bernegara sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>21</sup>

Penegakan hukum sebagai proses yang hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, namun mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi ( Wayne Lavre ). Secara Konsesional, inti serta arti penegakan hukum terletak dikegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

---

<sup>21</sup>Chaerudin, Syaeful Ahmad Dinar, Syarif Fadilah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm 87

terjabarkan pada kaidah-kaidah yang mantab dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk melahirkan, menciptakan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>22</sup>

Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodipitro,<sup>23</sup> penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan baik, yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundang-undangan dan kurangnya partisipasi masyarakat

---

<sup>22</sup>Soerjono Soekanto, op. cit hlm 5

<sup>23</sup>Mardjono Reksodipuro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76

Untuk menegakkan suatu hukum diperlukan adanya sanksi. Sanksi dalam hukum administrasi adalah “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara”, berdasarkan pada definisi ini maka ada tampak empat unsur sanksi dalam Hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan, bersifat hukum publik, digunakan oleh pemerintah, sebagai reaksi atas ketidaknyamanan.<sup>24</sup>

Jenis sanksi administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:<sup>25</sup>

1. Sanksi *Reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang diajukan untuk mengembalikan pada kondisi awal sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuurwang dwangsom*
2. Sanksi *punitif* artinya sanksi yang ditujukan untuk memberi hukuman kepada seseorang misalnya ada berupa denda administrave
3. Sanksi *Regresif* adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidaktataan terhadap ketentuan yang terhadap dalam ketetapan yang diterbitkan.

---

<sup>24</sup>Ridwan HR, op. cit hlm 315

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 319

Penegakan hukum administrasi dapat dilakukan oleh pejabat tata usaha negara tanpa melalui proses peradilan sehingga proses pengenaan sanksi administrasi ini sendiri prosesnya cepat, hal ini yang membedakan sanksi administrasi dengan sanksi lainnya. Menurut Sajipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagai, jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Suatu penegakan hukum sebenarnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjunjung suatu keadilan dalam masyarakat. Namun pada kenyataan yang ada, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah sesuai dengan tujuan dan prinsip dari penegakan hukum itu sendiri. Banyak masyarakat tidak mendapatkan keadilan dari penegakan hukum tersebut dan malah merasa ditindas oleh pemerintah. Penegakan hukum jika tidak diimbangi dengan adanya sanksi maka akan sulit dilakukan. Hal ini dikarenakan sanksi akan memberikan rasa jera dan bersalah pada setiap pelanggar peraturan hukum sehingga tidak mengulangi perbuatan pelanggaran hukumnya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Karena penulis akan melakukan penelitian lapangan yaitu pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dengan tujuan agar mendapatkan data serta mendapatkan informasi yang relevan, kemudian penulis bisa melakukan identifikasi dan menganalisis serta dilanjutkan dengan bagaimana mengatasi masalah yang ada yaitu penerapan pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran.

##### B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang digunakan dalam satuan penelitian guna menganalisis dan memberikan jawaban atas efektifitas bekerjanya seluruh struktural hukum yang secara langsung dilaksanakan di masyarakat.<sup>1</sup> Pada penelitian ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis yang bertujuan untuk mengkaji dan

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 14.

menganalisis Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.

### **C. Alasan pemilihan lokasi**

Penulis memilih lokasi penelitian di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur karena KPI merupakan izin dan mengawasi tentang lembaga yang menjadi perantara menteri untuk mengeluarkan izin penyiaran seluruh stasiun radio swasta di wilayah Jawa Timur. KPI juga merupakan lembaga yang independen yang mengatur mengenai hal-hal tentang penyiaran dan mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan serta menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan serta pedoman perilaku penyiaran dan program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Alasan penulis memilih wilayah Jawa Timur karena berdasarkan data dan informasi yang diperoleh wilayah Banyuwangi dan Pacitan masih terdapat lembaga



penyiaran swasta yang tidak memiliki izin penyiaran dikarenakan kurangnya pengawasan dari KPID Jawa Timur.

#### **D. Jenis Dan Sumber data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan dua jenis data. Uraian tentang data yang dikaji meliputi beberapa hal sebagai berikut :

##### **1. Data Priemer**

Yang dimaksud dengan data primere dalam penelitian ini yaitu data yang peneliti peroleh secara langsung dari hasil penelitian yang ada di lapangan yaitu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur. Data ini berhubungan dengan judul yang penulisan hukum dan permasalahan yang diangkat. Sumber data primer adalah hasil wawancara yang diperoleh dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur.

##### **2. Data Sekunder**

- a. Undang - Undang Negara Republik Indonesia
- b. Undang - Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- c. Undang - Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Ketentuan Operasional Dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
- f. Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik
- g. Buku-Buku Hukum
- h. Skripsi dan Jurnal
- i. Doktrin dan pendapat-pendapat para ahli
- j. Dokumen-dokumen yang terkait dengan perizinan radio

#### **E. Teknik Pengumpulan/Pengambilan Data**

Teknik pengambilan data adalah hal yang penting dalam suatu penelitian. Setelah memperoleh data baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan. Pengambilan/pengumpulan data merupakan proses pengorganisaian dan mengumpulkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data. Pengambilan/pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan data-data yang di peroleh dilapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang) dari data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah.

## **F. Populasi Dan Sampel**

### **1. Populasi**

Populasi adalah keseluruhan obyek, gejala, individu, dan kejadian yang akan diteliti.<sup>2</sup> Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah pada pegawai Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur terkait Izin penyelenggaraan penyiaran radio guna untuk diambil pendapat maupun keterangannya terhadap judul peneliti

### **2. Sampel**

Sample merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk menjadi sumber data.<sup>3</sup> Dalam hal ini yang dapat diambil sebagai sample adalah populasi, jadi peneliti mengambil sample responden secara acak. Sample yang digunakan dalam

---

<sup>2</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 44.

<sup>3</sup> Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 54.

penelitian ini adalah 5 orang sebagai dalam hal merupakan sumber data yang dibutuhkan.

1. A.Afif Amrullah (Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)
2. Bashlul Hazami (Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)
3. Nur Elya Anggraini (Koordinator bidang perizinan)
4. Palupi (staff bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran (perizinan))
5. Henny (staff bidang pengelolaan struktur dan sistem penyiaran (perizinan))

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah hal yang penting dalam suatu penelitian. Setelah memperoleh data baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan. Analisa data merupakan proses pengorganisaian dan mengumpulkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data-data. Teknik analisa data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu peneliti mendiskripsikan data-data yang di peroleh dilapangan (wawancara, dokumentasi, studi lapang) dari data tersebut kemudian dilakukan analisa untuk permasalahan yang terdapat

dalam rumusan masalah. Berdasarkan analisis deskriptif kualitatif maka data yang di peroleh dari penelitian lapangan selanjutnya akan dikelompokkan dan diseleksi berdasarkan kualitas dan kebenaranyang kemudian akan dihubungkan dengan menggunakan kaidah, teori, dan asas hukumyang diperoleh melalui studi kepustakaan yang ada akhirnya menarik kesimpulan dan memperoleh jawaban atas permasalahan yang di bahas.

#### **H. Definisi Operasional**

1. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan sejauh seberapa jauh target atau rencana bisa tercapai seperti kualitas, kuantitas dan waktu yang dapat di tentukan. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka akan semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas juga dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
2. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi untuk memberikan pelayanan kepentingan masyarakat.

3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah adalah instansi yang berada di daerah guna mengawasi segala macam bentuk atau tindakan yang melanggar Undang – Undang.

Spektrum Frekuensi radio adalah merupakan sumber daya alam terbatas dan strategis serta mempunyai nilai ekonomis tinggi sehingga harus dikelola secara efektif dan efisien.





## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Gambaran Umum Jawa Timur

###### a. Kondisi Geografis

Jawa Timur merupakan provinsi yang terletak di sebelah timur pulau Jawa antara  $111^{\circ}14'4''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}12'-8^{\circ}48'$  Lintang Selatan, dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia di sebelah selatan, Provinsi Bali di sebelah timur, Laut Jawa di sebelah utara dan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Kondisi geografis Jawa Timur sangat strategis, hal ini dikarenakan Jawa Timur menjadi pintu utama perdagangan di Indonesia bagian timur sejak jaman belanda.<sup>1</sup>

Luas wilayah Jawa Timur mencapai  $47.995 \text{ km}^2$ , merupakan provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa. Jawa Timur terbagi dalam dua wilayah yaitu daratan dan Kepulauan Madura. Luas wilayah Jawa Timur daratan sebesar 88,71 persen atau seluas  $42.577 \text{ km}^2$ ,

---

<sup>1</sup>Berdasarkan Data dari BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2017



sementara luas kepulauan Madura sekitar 11,29 persen atau seluas 5.418 km<sup>2</sup>.<sup>2</sup> Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, atau terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota dengan Kota Surabaya sebagai ibukota provinsi, empat kabupaten terdapat di pulau Madura.<sup>3</sup> Jumlah penduduk di provinsi Jatim pada tahun 1998 dari hasil proyeksi penduduk oleh BPS Jatim sebanyak 33.447.470 jiwa. Kota Surabaya merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling besar yaitu 2.373.083 jiwa. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kota Mojokerto dengan 107.123 jiwa.

b. Kondisi Sosial

Kondisi sosial di Jawa Timur berhubungan dengan kualitas pendidikan serta kesehatan masyarakat di daerah ini. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah perguruan tinggi negeri paling banyak di Indonesia. Kota Surabaya memiliki lima perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Airlangga, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Negeri Surabaya, Politeknik Surabaya dan IAN Sunan

---

<sup>2</sup>Berdasarkan Data dari BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

<sup>3</sup>Berdasarkan Data dari BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Ampel. Sedangkan di Malang terdapat empat perguruan tinggi negeri. Selain itu masih terdapat perguruan tinggi negeri yang berada di wilayah Jawa Timur. Banyaknya jumlah perguruan tinggi di Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah ini.<sup>4</sup>

Kondisi kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan tentang pola hidup sehat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang terjangkau, upaya pencegahan serta pengobatan penyakit, apotik serta toko obat, ketersediaan tenaga medis serta paramedis, tempat tinggal yang sehat dan bersih, lingkungan hidup dan lain-lain. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan bagi masyarakat di provinsi Jawa Timur. Pengamatan kesehatan pada anak balita serta anak pra sekolah dilakukan melalui deteksi dini perkembangan. Pemeriksaan perkembangan di Jawa Timur pada 2010 telah dilaksanakan pada 2.321.542 anak balita dan pra sekolah. Sedangkan pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah difokuskan pada Usaha Kesehatan Sekolah (UKS).

---

<sup>4</sup>Berdasarkan Data dari BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

Keberadaan sarana kesehatan mendukung kualitas kesehatan. Terdapat 10 jenis sarana kesehatan yang ada di Provinsi Jawa timur, yaitu Rumah sakit sebanyak 309 unit, Puskesmas sebanyak 950 unit, Puskesmas pembantu sebanyak 2.273 unit, Puskesmas keliling sebanyak 1.063, Pondok kesehatan Desa sebanyak 1.608 unit, Desa siaga sebanyak 8.501 unit, Posyandu sebanyak 45.603 unit, Pondok bersalin Desa sebanyak 4.580 unit, Rumah bersalin sebanyak 236 unit dan balai Pengobatan klinik 804 unit. Selain itu banyaknya tenaga kesehatan di Jatim juga mendukung kualitas kesehatan untuk masyarakat.

## **2. Gambaran Umum Komisi Penyiaran Indonesia**

### **a. Gambaran Umum Instansi**

Komisi Penyiaran Indonesia dibentuk karena amanah dari Undang-Undang No.32 tahun 2002 Pasal 7 ayat 4 yaitu KPI terdiri dari Pusat KPI pusat dibentuk tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk ditingkat Provinsi dengan tujuan Pasal 7 ayat (2) untuk mengatur mengenai penyiaran. Dalam menjalankan tugasnya KPI Pusat diawasi oleh DPR RI dan KPID Provinsi diawasi DPRD Provinsi. KPI pusat hanya mengatur tentang penyiaran di daerah pusat dan KPID Provinsi mengatur tentang

penyiaran di daerah Provinsi masing-masing. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 serta 10 Undang-Undang No.32 tahun 2002, anggota KPID Jatim berjumlah 7 orang yang dipilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas usul masyarakat melalui uji ketaatan dan kelayakan secara terbuka, untuk selanjutnya ditetapkan secara administratif oleh Gubernur atas usul DPRD Provinsi.

b. Visi dan Misi <sup>5</sup>

a) Visi

Terwujudnya sistem penyiaran di Jawa Timur yang sehat Inklusif, Berbudaya dan Bermartabat berbasis sinergi dan partisipasi

b) Misi

- 1) Berperan serta mendorong pembangunan di Jawa Timur melalui industri penyiaran untuk kemakmuran masyarakat
- 2) Memastikan legalitas kegiatan penyiaran bagi setiap lembaga penyiaran
- 3) Mendorong lembaga penyiaran mewujudkan siaran yang inklusif, adil, merata dan mengangkat nilai-nilai budaya lokal secara

---

<sup>5</sup>Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur

proposional serta mematuhi P3SPS guna mengupayakan isi siaran yang mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa

4) Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan siaran yang sehat dan berkualitas

5) Menyediakan aplikasi layanan penyiaran berbasis teknologi informasi dan menguatkan kerjasama dengan stakeholder penyiaran

c. Tugas dan Kewajiban KPID

KPID mempunyai tugas dan kewajiban :<sup>6</sup>

- a) Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b) Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c) Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait;
- d) Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, serta seimbang;

---

<sup>6</sup>Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur

e) Meneliti, menampung menindaklanjuti aduan, kritik, sanggahan, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran;

f) Dan menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas dibidang penyiaran

d. Fungsi dan Wewenang KPID

Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Didalam Pasal 8 ayat (1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Pasal 8 ayat (2) dalam melaksanakan fungsinya yang diatur dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:<sup>7</sup>

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. (Pasal 7 Undang-Undang No.32 tahun 2002)

<sup>7</sup>Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur

- c. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- d. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.

Dalam tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Timur, mereka bertugas menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban tersebut KPID memiliki bidang-bidang khusus yang menangani di bidang penyiaran tersebut, yaitu: <sup>8</sup>

1) BIDANG STRUKTUR PENYIARAN

- a. Menuntaskan legalitas radio esk-RKPD (Radio Khusus Pemerintah Daerah)
- b. Memetakan pemberian usulan kanal frekuensi untuk Radio Komunitas
- c. Penegakan hukum terhadap Lembaga Penyiaran ilegal dengan terlebih dulu memetakan derajat legalitas Lembaga Penyiaran yang bersangkutan
- d. Menuntaskan penanganan TV kabel yang kian marak di daerah pinggiran

---

<sup>8</sup>Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur

- e. Penyusunan database Lembaga Penyiaran melalui sistem informasi berbasis *web*

## 2) BIDANG KELEMBAGAAN

- a. Melaksanakan penganugerahan tahunan bagi program siaran radio dan televisi terbaik
- b. Membuat regulasi kelembagaan : Peraturan kelembagaan, Kode Etik, dan Mekanisme Kerja
- c. Membuat regulasi mengenai penanganan pengaduan agar sejalan dengan Keterbukaan informasi
- d. Mensosialisasikan program dan kegiatan KPID melalui media massa

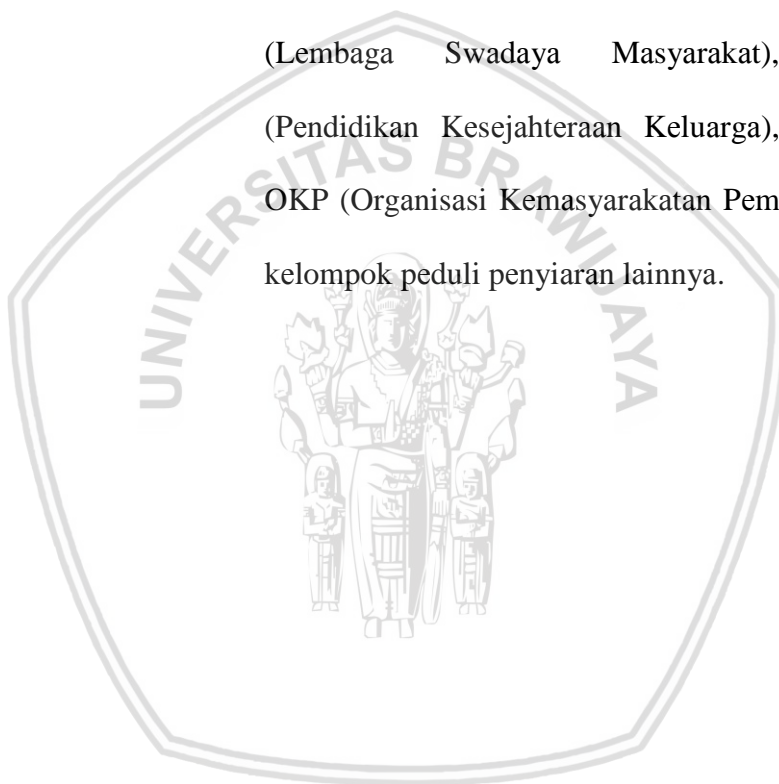
## 3) BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN

- a. Menerapkan ketentuan dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran P3/SPS secara tegas, namun mengedepankan aspek edukasi
- b. Melakukan Media Literasi ke publik, termasuk ke sekolah-sekolah
- c. Pengawasan tidak hanya megandalkan pengaduan masyarakat, tapi prokatif melakukan

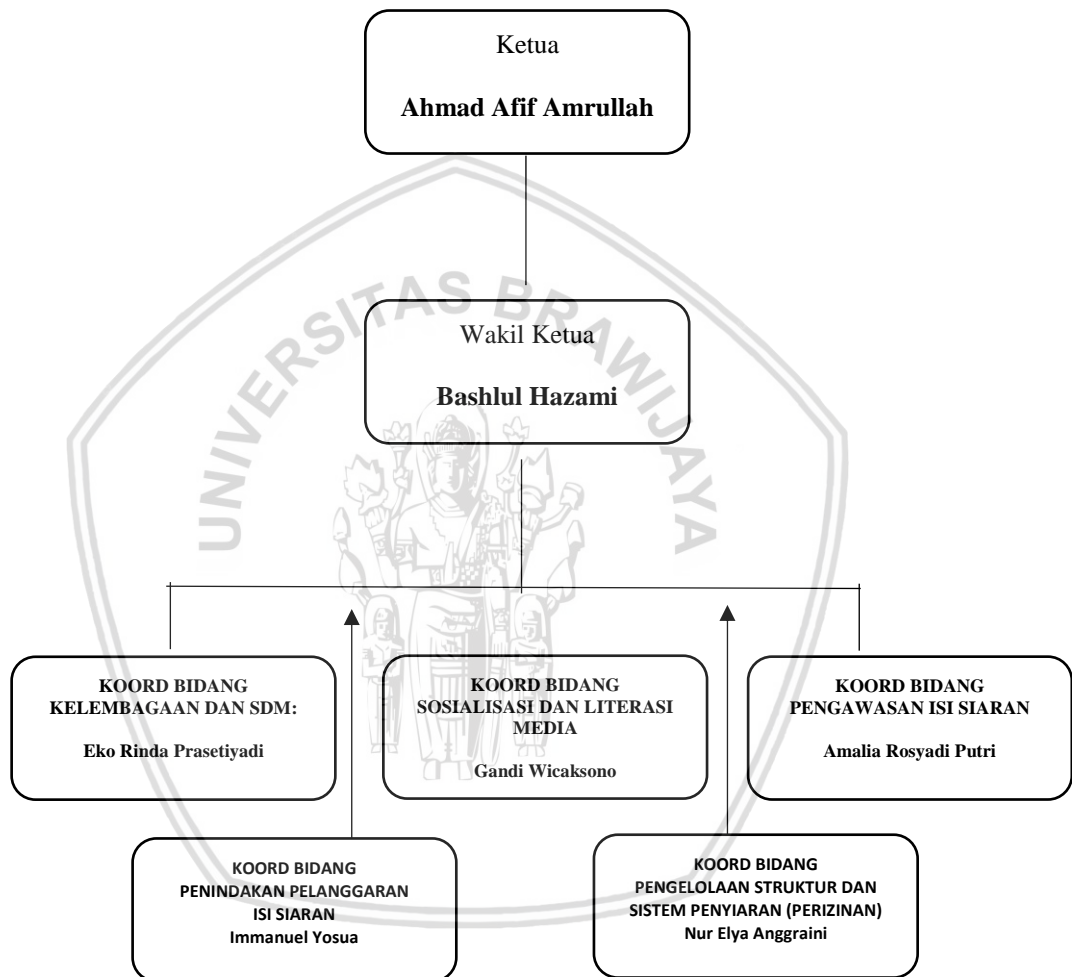


monitoring dan recording langsung, khususnya siaran televisi

- d. Pengaduan masyarakat akan isi siaran dipermudah dengan memanfaatkan segala media akan dipakai
- e. Pelibatan segala komponen : Pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), PKK (Pendidikan Kesejahteraan Keluarga), Ormas, OKP (Organisasi Kemasyarakatan Pemuda) dan kelompok peduli penyiaran lainnya.



**Gambar 1 struktur organisasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur periode 2016-2019**



*Data primer : Diolah , bulan Juli 2018*

**B. Efektivitas Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran terkait izin penyiaran radio**  
Pengawasan merupakan tindakan yang dilakukan

Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Timur untuk stasiun radio di daerah Jawa Timur. Wewenang dalam melakukan pengawasan untuk stasiun radio terdapat pada Pasal 8 ayat (2)

Undang-Undang No.32 tahun 2002 tentang penyiaran. Pada dasarnya Komisi Penyiaran Indonesia hanya bersifat mengawasi program penyiaran yang sudah mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran akan tetapi Komisi Penyiaran Indonesia juga merekomendasikan izin penyelenggaraan penyiaran dan pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran. “Dalam mengeluarkan izin penyelenggaraan penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia membagi tugas dengan KOMINFO. Stasiun radio dikatakan mendapat izin penyelenggaraan penyiaran apabila telah memenuhi syarat dan lolos dari 3 (tiga) kriteria, yaitu isi program siaran telah dinyatakan bagus oleh Komisi Penyiaran Indonesia, perlengkapan pemancar telah dinyatakan bagus oleh balai monitoring, administrasi telah dinyatakan lengkap oleh KOMINFO”.<sup>9</sup>

Komisi Penyiaran Indonesia juga melakukan tindakan preventif yaitu berupa sosialisasi dan penyuluhan yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Sedangkan tindakan represif dilakukan untuk mengawasi setiap program siaran stasiun Radio. Apabila program siarannya dinyatakan telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan standar Program Siaran (SPS) yang selanjutnya disebut

---

<sup>9</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bashlul Hazzami Wakil Ketua (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)

P3SPS maka Komisi Penyiaran Indonesia dapat merekomendasikan mencabut izin penyelenggaraan penyiaran kepada KOMINFO untuk dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Tata cara pencabutan juga hampir mirip dengan tata cara memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran dengan melalui 3 kriteria, yaitu program siaran, peralatan dan perlengkapan pemancar, dan administrasi. Program siaran yang menentukan layak atau tidaknya adalah Komisi Penyiaran Indonesia dengan melihat P3SPS. Peralatan dan perlengkapan yang menentukan dari balai monitoring yang berada di bawah KOMINFO. Administrasi yang menentukan adalah KOMINFO. Apabila stasiun radio telah melanggar salah satu kriteria tersebut dapat diajukan untuk dicabut izin penyelenggaraan penyiaran melalui Pengadilan Negeri.

Menurut Bapak Azzam, “Kami berusaha semampu kami untuk mengawasi, untuk di wilayah Jawa Timur sendiri stasiun radio lebih dari 200 lebih itu termasuk yang telah memiliki izin tetap dan termasuk juga pada stasiun radio yang dalam tahap proses administrasinya (mengurus izinnya) setahu saya pada kasus untuk pemindahan atau mengalihkan izin kepada pihak lain gak ada mas, yang terdapat di Jawa Timur akusisi saham. Akusisi yaitu sebuah cara kerja atau mekanisme yang terdapat pada dunia bisnis. Dalam hal akusisi yang dimaksud disini yaitu

perubahan saham sebuah perusahaan PT khususnya (stasiun radio) dibidang penyiaran. Perubahan saham atau akusisi pada satu perusahaan ke perusahaan lain sebenarnya wajar terjadi cuma selama tidak mengganggu ketertiban umum dan tidak melanggar ketentuan yang ada tidak masalah”<sup>10</sup>

“Wewenang Komisi Penyiaran Indonesia diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang berbunyi :<sup>11</sup>

(2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang;

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.”

“Wewenang tersebutlah yang membatasi tindakan yang dilakukan Komisi Penyiaran Indonesia hanya bertindak sebatas merekomendasi. Dalam pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran

---

<sup>10</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bashlul Hazzami Wakil Ketua (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)

<sup>11</sup> Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran

lembaga penyiaran swasta juga dijelaskan pelanggaran seperti apa yang dilakukan karena rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia yang berbunyi;<sup>12</sup>

(3) Izin penyelenggaraan penyiaran dicabut oleh Menteri apabila Lembaga Penyiaran swasta ;

- a. Melanggar ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
- b. Atas laporan KPI dinyatakan tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa pemberitahuan;
- c. Memindahtangankan izin penyelenggaraan penyiaran kepada pihak lain
- d. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
- e. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran yang dikeluarkan oleh KPI setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam huruf b,c,e seperti yang disebutkan oleh Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran

---

<sup>12</sup>Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran swasta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127

swasta merupakan suatu pencabutan izin yang dilakukan atas rekomendasi dari Komisi Penyiaran Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran telah dijelaskan bagaimana lembaga penyiaran publik, swasta, komunitas, dan berlangganan dalam menjalankan penyiaran khususnya radio, akan tetapi masih ada dari lembaga-lembaga tersebut yang tidak memperhatikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. ‘Untuk wilayah seperti pacitan dan banyuwangi, kami mendapatkan hanya sekedar info saja ini mas, bahwa di daerah wilayah tersebut terdapat stasiun radio swasta yang bangkrut. Cuma masalahnya disini kami tidak mempunyai data yang akurat mengenai stasiun radio swasta tersebut. Bangkrut atau tidak berganti nama tau tidak yang kami ketahui hanya sekedar info saja mas tetapi untuk masalah yang menyeluruh itu biasanya kembali ke peusahaan itu sendiri.<sup>13</sup>

Pemeriksaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur hanya disekitar daerah Surabaya, Malang, Kediri, Blitar, dan daerah sekitaran Surabaya.

---

<sup>13</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bashlul Hazzami Wakil Ketua (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur) dan ibu heny bidang perizinan

Tenaga yang dibutuhkan sangat banyak untuk memeriksa seluruh wilayah Jawa Timur. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur mengatasi kekurangan tenaga dengan melakukan sosialisai dan penyuluhan. Dalam wilayah Jawa Timur sendiri terdapat stasiun radio swasta yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran. Stasiun radio swasta di wilayah Jawa Timur yang tidak terdaftar dalam Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur merupakan stasiun radio swasta yang tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran, stasiun radio swasta yang mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran sebagai berikut :<sup>14</sup>

**Tabel data lembaga penyiaran radio swasta yang sudah mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran tetap 2018**

No	Wilayah	Nama lembaga	Sebutan diudara	Wilayah layanan siar
1	Batu	PT Radio Mitra Suara	Mitra 97 FM	Kota Batu
2	Kab. Bangkalan	PT Radio Gita Segara	Segara Suramadu FM	Kab. Bangkalan

<sup>14</sup>Berdasarkan data dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur



	Kab. Bangkalan	PT Radio amnna	Amanna FM	Kab. Bangkalan
3	Kab. Banyuwangi	PT Radio Suara Habibulloh FM	Radio Suara Habibulloh FM	Banyuwangi, Glagah
	Kab. Banyuwangi	PT Radio Suara Tawangalun	Tawang Alun	Banyuwangi dan sekitarnya
	Kab. Banyuwangi	PT Radio Sritanjung Setia	Sritanjung	Rogojampi, Pusat Kab. Banyuwangi
	Kab. Banyuwangi	PT Radio suara Mandala	Mandala FM	Pusat Kab. Banyuwangi
	Kab. Banyuwangi	PT Radio Genta Bawana Sakti	GBS FM	Banyuwangi dan sekitarnya
	Kab. Banyuwangi	PT Radio Swarawangi Timur	Bintang Tenggara	Muncar, rogojampi dan Kab. Banyuwangi
	Kab. Banyuwangi	PT Radio Visi Inti Swara Frekuensi Modulasi	VIS FM News & Hits Radio	Pusat Kab. Banyuwangi
	Kab. Banyuwangi	PT Radio Lirik Fajar Swara	Lirik Fajar Swara	Pusat Kab. Banyuwangi
	Kab. Banyuwangi	PT Radio Milenium Century	MC FM	Sempu, genteng dan Pusat Kab. Banyuwangi

		Frekwensi Modulation		
4	Kota Blitar	PT Radio Istana Merdeka	Istana FM	Pusat kota Bitar
	Kota Blitar	PT Radio Suara Patria Jaya	Radio Patria FM	Pusat Kab. Blitar
	Kota Blitar	PT Radio Mayangkara Ria	Radio Mayangkara Ria	Pusat kota Blitar
5	Kab. Bojonegoro	PT Radio Istana Siar	Radio Istana FM	Pusat Bojonegoro dan Kab. Bojonegoro
	Kab. Bojonegoro	PT Radio Puspa Jaya	Puspa Jaya FM	Kab. Bojonegoro
	Kab. Bojonegoro	PT Radio Bathara Suara Sakti	Bass FM	Kab. Bojonegoro
	Kab. Bojonegoro	PT Radio Prima Fm Bojonegoro	Radio Prima FM	Kab. Bojonegoro
	Kab. Bojonegoro	PT Radio Surya Nada Kencana	Surya FM	Kab. Bojonegoro
6	Kab. Bondowoso	PT Radio Romantika Swara Bondowoso	Romantika FM	Kab. Bondowoso

	Kota Bondowoso	PT Radio Swara Fiska Ramatama	Rama FM	Kab. Bondowoso
	Kab. Bondowoso	PT Radio Passopati Graha Media Nusantara	Passopati FM	Kab. Bondowoso
	Kab. Bondowoso	PT Radio Bahana Swara Citra Bondowoso	Citra Radio	Kab. Bondowoso
7	Kab. Gresik	PT Radio Elang Bayu Swara	Elbayu	Gresik dan sekitarnya
	Kab. Gresik	PT Radio Giriswara Indahsakti	Suara Giri FM	Kab. Gresik
8	Kab. Jember	PT Radio Kiranaindah Sentrasuara	Kiss FM	Kab. Jember
	Kab. Jember	PT Radio Prosaliriknada	Prosalina FM	Kab. Jember
	Kab. Jember	PT Radio Suara Akbar	Akbar FM	Kota Jember
	Kab. Jember	PT Radio Swara Tunas Utama	Ratu FM	Kab. Jember
	Kab. Jember	PT Radio Soka Adiswara	Soka Radio	Kab. Jember

	Kab. Jember	PT Radio Suara Kartika Jember	Radio Kartika FM	Kab. Jember
	Kab. Jember	PT Warta Mutiara Jember	Mutiara FM	Radius maksimum 2.5 KM dari pusat lokasi pemancar
	Kab. Jember	PT Radio Digi Echo Limatama	Digi FM	Kab. Jember
9	Kab. Jombang	PT Radio Gita Nada Eka Septa	Gita Jombang	Kab. Jombang
	Kab. Jombang	PT Radio Citrawanodya Angkasa	Citra FM	Kab. Jombang
	Kab. Jombang	PT Radio Suara Jombang Nawa Kartika	Kartika FM	Kab. Jombang
10	Kota Kediri	PT Radio Suara Kediri Sabdotomo	Suara Kediri FM	Kota Kediri
	Kota Kediri	PT Radio Siara Wijang Songko	RWS FM	Kota Kediri
	Kota Kediri	PT Radio Swaraandika Jaya	Radio Andika	Kota Kediri
	Kota Kediri	PT Radio Suara Mahameru	Radio Mahameru FM	Kota Kediri

	Kota Kediri	PT Radio Bonassa Mediaswara	Radio Bonasa FM	Kab. Kediri
	Kota Kediri	PT Radio Citra Airlangga	Airlangga News	Kediri dan sekitarnya
	Kota Kediri	PT Radio Taurus Adhiswara	TAS	Kota Kediri dan sekitarnya
11	Kab. Lamongan	PT Radio Ronggo Hadi	Radio Ronggohadi	Kepoh Batu, Kab. Bojonegoro (terdapat kesalahan pada pencatuman IPP)
	Kab. Lamongan	PT Radio Praja Media Swara	Prameswara FM	Kab. Lamongan
12	Kab. Lumajang	PT Sentral Suara Asia	Sentral FM	Kab. Lumajang
	Kab. Lumajang	PT Radio Swarasemeru Permai	Semeru FM	Kab. Lumajang
	Kab. Lumajang	PT Radio Gloria Paramitha Sempurna	Radio Gloria	Kab. Lumajang
13	Kota Madiun	PT Radio Madya Ctrra Swara	Madya FM	Kota Madiun

	Kota Madiun	PT Radio Moderato	Moderato FM	Kota Madiun
	Kota Madiun	PT Radio Duta Cakrawala Serasi	DCS FM	Kota Madiun
	Kota Madiun	PT Usaha Radio siaran Gabriel	Radio Suara Pamekasan	Kota Surabaya
14	Kab. Magetan	PT Radio Swara Sarangan Indah FM	Radio Rasi FM	Kab. Magetan
	Kab. Magetan	PT Radio Sanjaya Kasih Kurnia	Sanjaya FM	Kab. Magetan
15	Kota Malang	PT Radio Mitra Adi Swara	Radio MAS FM	Kota Malang
	Kota Malang	PT Radio Chakra Bhuwana	89,5 RCBFM	Kota Malang
	Kota Malang	PT Radio Andhika Lugas Swara	Radio Andalus FM	Kota Malang
	Kota Malang	PT Radio Kececwara	MFM	Kota Malang
	Kota Malang	PT Radio Kharisma Dian Suara	KDS FM	Kota Malang

	Kota Malang	PT Radio Pariwisata Senaputra	Radio Senaputra	Kalipare, Ragak
	Kota Malang	PT Radio Gita Loka Swara	Radio Gita FM	Kota Malang
	Kota Malang	PT Radio Suara Pionir	Sound FM	Kota Malang
	Kab. Malang	PT Solagracia	Sahabat Sola	Kab Malang
	Kab. Malang	PT Radio suara millennium	Radio kosmonita	Kecamatan Klojen
	Kab. Malang	PT Radio puspita hutama nusantara	Puspita FM	Kota Malang
	Kab. Malang	PT Radio total prima sukses	Kencana FM Malang	Pakisaji, Kepanjen Kab. Malang
	Kab. Malang	PT Radio Khalimaya bhaskara	Khalimaya bhaskara	Singosari, Kab. Malang
	Kab. Malang	PT Suara Muda Sakti	Radio elfara	Kab. Malang
16	Kota Mojokerto	PT Maja Pari Indah Suara Mojokerto	Radio maja FM suara Mojokerto	Kab Mojokerto

	Kota Mojokerto	PT Radio Arupadhatu citra Indonesia	R FM	Kota Mojokerto
17	Kab. Nganjuk	PT Radio Nganjuk Amarta maju sejahtera	Jossh FM Nganjuk 92,7	Kab. Nganjuk
	Kab. Nganjuk	PT Radio Citra nande triswara	Nande FM	Kab. Nganjuk
	Kab. Nganjuk	PT Radio Jodhipati Budaya nagari	Jodhipati FM	Kab. Nganjuk
18	Kab. Ngawi	PT Radio Bahana Ngawai perkasa FM	Radio bahana	Kab. Ngawi
19	Kab. Pacitan	PT Radio Citra Buana FM Youk Yes	RCB FM Radionya Pacitan	Kab. Pacitan
	Kab. Pacitan	PT Radio Ratna Citra gandini	Grindulu FM	Kab. Pacitan
	Kab. Pacitan	PT Radio Puspa Budaya	Puspa FM	Kab. Pacitan
20	Kab. Pamekasan	PT Radio Ada media	Radio ada FM	Kab. Pamekasan
	Kab. Pamekasan	PT Radio Madura Jaring media	Radio Madura FM	Kab. Pamekasan



	Kab. Pamekasan	PT Radio Swara Karimata permai	Karimata	Kab. Pamekasan
	Kab. Pamekasan	PT Radio Suara Pamekasan indah	Radio Suara Pamekasan	Kota Surabaya
21	Kota Pasuruan	PT Radio Pasuruan warna pesona	Radio wahana Pasuruan	Kota Pasuruan
	Kab. Pasuruan	PT Radio Roudlotul Athfal 45	RDA 45 Pasuruan	Kab. Pasuruan
	Kab. Pasuruan	PT Parisuka Notasi Rama	Panorama FM	Pandaan, Prigen Kab. Pasuruan
	Kab. Pasuruan	PT Radio Star Wibawa anugerah	Star FM 105, 5	Kab. Pasuruan
22	Kab. Ponorogo	PT Usaha Radio Siara gema surya	Radio gema surya	Kab. Ponorogo
	Kab. Ponorogo	PT Radio Duta nusantara swara Ponorogo	Duta Nusantara	Kab. Ponorogo
23	Kota Probolinggo	PT Angkasa jaya permai	Angkasa FM	Kota Probolinggo
	Kab. Probolinggo	PT Radio Emdi	Emdi stasion	Krucil, Kab. Probolinggo

	Kab. Probolinggo	PT Radio Probolinggo Suara Andika	Radio Prosa FM	Pakuniran Kab. Probolinggo
24	Kab. Sampang	PT Radio Pas Navaka	Salsabila FM	Kab. Sampang
25	Kab. Sidoarjo	PT Radio Surabaya Cipta Perdana	Delta FM	Kab. Sidoarjo
	Kab. Sidoarjo	PT Radio Shamsindo Indonusa	Suara Muslim	Kab. Sidoarjo
	Kab. Sidoarjo	PT Radio Aneka Getar estetika	B FM	Krian, Kab. Sidoarjo
26	Kab. Situbondo	PT Radio Bahana Swara Asembagus	Bhasa 93,1 FM	Kab. Situbondo
	Kab. Situbondo	PT Radio Suara besuki indah	Radio SBI sehati FM	Kab. Situbondo
27	Kab. Sumenep	PT Radio Madu FM	Madu FM	Kab. Sumenep
	Kab. Sumenep	PT Radio Nada FM Madura	Radio Nada	Kab. Sumenep
28	Kota Surabaya	PT Radio Shinta warta gemilang	Elshinta Surabaya News & Talk	Kota Surabaya

	Kota Surabaya	PT Radio Suara Digital Indonesia	My Radio	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Bhumi pertiwi supraindo	Smart FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Carolina Arjuno	Carolina	Sangkapura, tambak, Kab. Gresik
	Kota Surabaya	PT Radio Suara sangkakala Surabaya	Radio sangkakala	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Jasmara	Radio Yasmara	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Kota buaya mandiri	Kota FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Kreasi indah dunia suara	Radio Kosmonita	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Zodiac	Colors Radio 87,7	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Media caraka angkasa	Media FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Stratosfir	Strato FM	Kota Surabaya

	Kota Surabaya	PT Radio Metro gema mega	Metro FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Suara suzana bhakti	Suzana FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Merdeka lokatama	Merdeka FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Miniwat pesona indah	Radio suara Al-Iman	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Mercury masa depan sukses	Mercury	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Salvatore	Radio Sonora	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Siaran cakrawala bhakti	Cakrawala FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Camar	103,1 Gen FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Ekalaras vicaksanatorya	El-victor FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Badang Penyelenggara Radio siaran Tjakra awiga	Sindo trijaya Surabaya	Kota Surabaya

	Kota Surabaya	PT Radio Gitaya gegana	She Radio	Kab. Sidoarjo
	Kota Surabaya	PT Radio Global nada prima	Global FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Widjaja	Widjaja FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Antariksa Radang IV	One Muslim	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Bahtera Swarayudha	Bahtera yudha FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Erabimasakti selaras	EBS FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Rajawali Mega	Radio Rajawali AM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Swara laras variacitra	La-victor AM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Devina Jelita	DJ FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Wahana informasi gemilang	FM 105,1 JJ	Kota Surabaya

	Kota Surabaya	PT Radio Harini jaya mandiri	Hard Rock FM Surabaya	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Suara mahasiswa turun bekerja	Radio MTB FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Bisnis Surabaya	Pas FM	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Kartika bahari dirgantarajaya	M Radio	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Laras pancar istana suara	1#Hit Music Station Surabaya	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Swara Perak jaya	Swara perak jaya	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Surabaya Pesona Femina	Radio Prambors Surabaya	Kota Surabaya
	Kota Surabaya	PT Radio Fiskaria jaya suara Surabaya	SS FM	Kota Surabaya

*Data Primer: Diolah bulan Juli*

Stasiun radio yang sudah mempunyai izin setiap tahunnya harus membayarkan biaya IPP frekuensi yang dibayarkan setiap tahun kepada bendahara negara. Apabila tidak membayar biaya IPP

frekuensi maka akan dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan dan mematikan frekuensi stasiun radio swasta tersebut. Ibu Henny, “stasiun radio swasta pasti tiap tahunnya mendaftarkan untuk memperoleh IPP tetap, akan tetapi IPP tetap tidak bisa langsung diperoleh harus menunggu IPP dari KOMINFO. Jadi jika tahun 2013 mendaftar belum tentu tahun 2013 mendapat IPP tetap bisa saja tahun 2016 baru mendapatkan IPP tetap.”<sup>15</sup> Stasiun radio swasta yang memiliki izin ternyata masih melakukan pelanggaran seperti jangka waktu dalam penyiaran yang didalam Pasal 34 ayat (1) point a Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran *izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun* ternyata masih ada yang izin penyelenggaraan penyiarannya hanya berjangka waktu beberapa tahun saja. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur tidak dapat memberikan data tentang stasiun radio swasta yang mempunyai izin beberapa tahun saja karena pihak yang mengeluarkan izin adalah KOMINFO.<sup>16</sup>

Dari data dan hasil wawancara oleh penulis dapat dianalisa bahwa efektivitas Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dilihat dari efektivitas hukumnya, menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut :

---

<sup>15</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Henny Bidang perizinan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa timur

<sup>16</sup>Data diperoleh dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur

## 1) Faktor Hukum

Faktor hukum dilihat dari substansi dari Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dikatakan bahwa “izin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.” Hal ini sangatlah jelas yang menyatakan kata *dilarang* pada Pasal tersebut ini yang mengartikan tidak boleh dipindahkan dengan alasan apapun. Pada praktiknya di Jawa timur sendiri terbilang cukup efektif dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran karena sejauh ini untuk praktik jual beli izin penyelenggaraan penyiaran di Jatim tidak pernah ditemukan atau bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun penyiaran. Seajuh ini masyarakat dan pemerintah telah berpartisipasi dengan sukarela yang sangat membantu oleh pemerintah karena hal kesadaran masyarakat itu sendiri telah menciptakan keteriban pada suatu peraturan ataupun Undang-Undang yang berlaku.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum disini adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dan KOMINFO. Dalam melakukan penegakan perpedoman pada Undang-Undang No 32 tahun 2002 tentang penyiaran dalam menjalankan tugasnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur bekerjasama dengan Balai Monitoring untuk melakukan pemeriksaan terhadap stasiun radio swasta yang



berada di wilayah Jawa Timur untuk dilakukan pengawasan terhadap stasiun radio swasta di Jawa Timur.

Dalam faktor penegakan hukumnya sudah efektif karena selalu dilakukan pemeriksaan untuk mengawasi stasiun radio swasta di wilayah Jawa Timur. Akan tetapi kurangnya kerjasama antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dan KOMINFO untuk mencari stasiun radio swasta di Jawa Timur yang masih tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran untuk dilakukan pendataan. Di wilayah Jawa Timur masih terdapat stasiun radio swasta yang belum memiliki izin penyiaran.

### 3) Faktor Sarana dan Prasarana

Faktor sarana dan prasarana berupa anggaran yang diberikan Pemerintah Jawa Timur untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur masih dinilai kurang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh wilayah Jawa Timur. Anggaran dan keterbatasannya fasilitas yang dimiliki Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur merupakan kendala serius yang dialami oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam melakukan pengawasan menyeluruh di wilayah Jawa Timur. Anggaran merupakan satu-satunya dana yang diberikan untuk KPID untuk melakukan tugasnya dalam memeriksa dan mengawasi stasiun radio swasta di wilayah Jawa Timur. Melihat sarana dan prasarana yang

masih kurang memenuhi membuat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran kurang efektif.

#### 4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat dapat dilihat dari kemauan masyarakat untuk memahami pentingnya mematuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Masyarakat membantu dengan melakukan pengaduan kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur untuk stasiun radio swasta yang berada di wilayah Jawa Timur yang telah melakukan pelanggaran. Apabila masyarakat dapat memahami pentingnya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan melakukan pengaduan maka akan sangat membantu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur untuk memeriksa stasiun radio swasta. Direktur stasiun radio swasta seharusnya juga memberi himbauan kepada bawahannya untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Karena kurang kepedulian masyarakat dalam melakukan pengaduan dan kurangnya himbauan dari direktur radio swasta untuk bawahannya membuat efektifitas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran kurang efektif.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Dilihat dari faktor kebudayaannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran bahwa dari budayanya sendiri masyarakat mulai menggeser nilai moral kehidupan yang

mengabaikan tentang peraturan. Melihat dari sejarahnya pelanggaran yang dilakukan stasiun radio swasta dari tahun ke tahun selalu besar dan terus menerus dilakukan oleh stasiun radio swasta tanpa mempedulikan pelanggaran yang dilakukan stasiun radio swasta didaerahnya.

### **C. Hambatan Efektivitas Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran**

Efektifitas Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran belum efektif karena adanya hambatan yang timbul karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dibagi menjadi 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal dari penerapan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran Sebagai berikut :

1. Kurangnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur untuk melakukan pengawasan lebih untuk seluruh wilayah Jawa Timur.
2. Kurangnya kerja sama antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dengan KOMINFO untuk melakukan penyelidikan untuk stasiun radio swasta yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran atau stasiun

radio yang izin penyelenggaraan penyiarannya hanya beberapa tahun saja.

3. Belum adanya sanksi apapun yang diberikan kepada stasiun radio swasta yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran ataupun stasiun radio swasta yang izinnya hanya beberapa tahun saja.

Faktor eksternal dari penerapan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya pengaduan terhadap stasiun radio swasta di daerah yang melanggar peraturan karena kebudayaan masyarakat sendiri.
2. Stasiun radio swasta yang tetap melakukan siaran tanpa memiliki izin penyelenggaraan penyiaran tanpa pengetahuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dan KOMINFO.
3. Sudah membudayanya pelanggaran-pelanggaran dari stasiun radio swasta dari tahun ketahun mulai dari pelanggaran ringan hingga menengah semua ada.

**D. Solusi yang dilakukan agar Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran lebih efektif**

Menurut Bapak Bashlul Hazzami “Pihak kami sudah memohon untuk menambah anggaran untuk pengawasan agar dapat memeriksa menyeluruh stasiun radio swasta yang ada di daerah Jawa Timur”.<sup>17</sup> “Kami juga meminta bantuan KOMINFO dari Balai Monitoring untuk memeriksa frekuensi agar dapat mengetahui stasiun radio swasta yang melakukan penyiaran tanpa mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran.”<sup>18</sup> Kurangnya alat dan perlengkapan yang memadai menjadi kendala serius bagi KPID dalam mengawasi stasiun radio swasta di wilayah Jawa Timur.

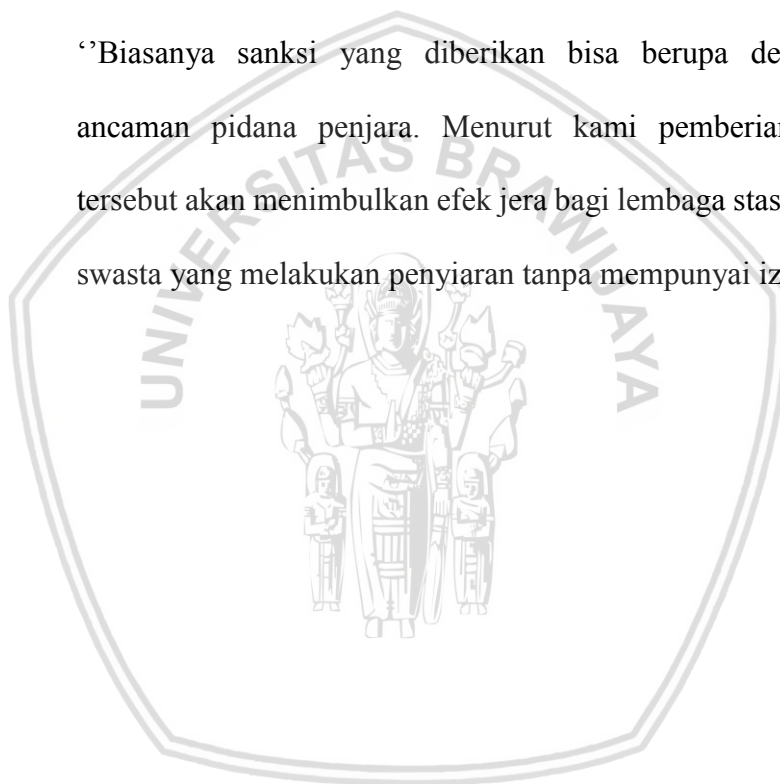
Tindakan preventif yang diberikan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur adalah dengan melakukan sosialisasi tentang Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Hal ini dilakukan agar lembaga stasiun radio swasta bisa lebih sadar dan menaati tentang larangan yang ada dalam peraturan tersebut dan mempunyai izin penyelenggaraan yang sesuai dengan peraturan tersebut. ‘Kami sudah sering melakukan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk membantu dengan melakukan aduan tentang stasiun radio yang melanggar di daerahnya. Tindakan represif yang dilakukan

---

<sup>17</sup> Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Bashlul Hazzami Wakil Ketua (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)

<sup>18</sup> Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Bashlul Hazzami Wakil Ketua (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)

oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dalam menegakkan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan bekerja sama oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur untuk menutup stasiun radio swasta dan membawanya pengadilan negeri karena telah melakukan penyiaran tanpa izin penyelenggaraan penyiaran. “Biasanya sanksi yang diberikan bisa berupa denda dan ancaman pidana penjara. Menurut kami pemberian sanksi tersebut akan menimbulkan efek jera bagi lembaga stasiun radio swasta yang melakukan penyiaran tanpa mempunyai izin.”



## BAB V

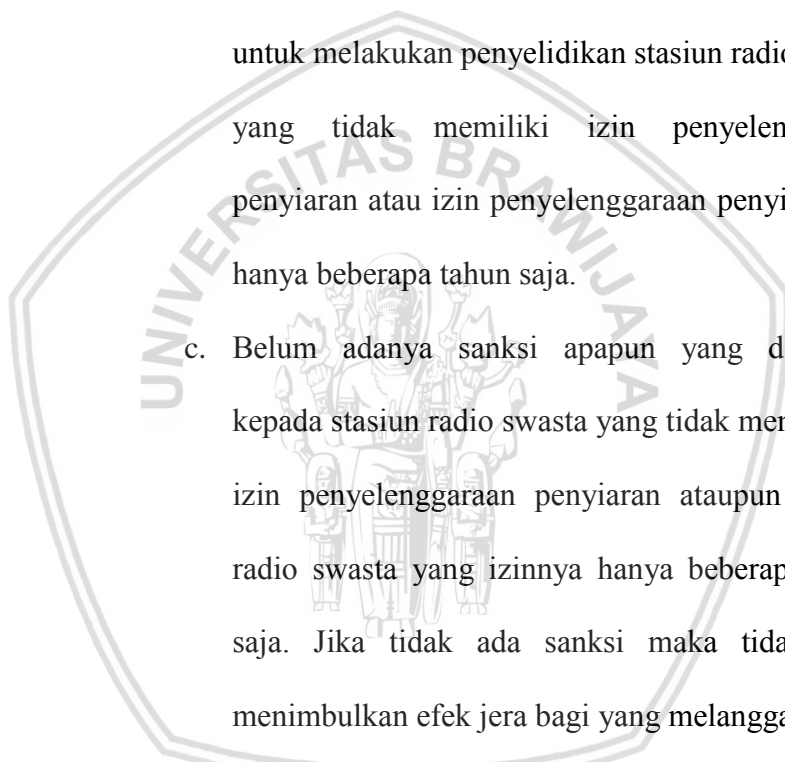
### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penulis. Kesimpulannya sebagai berikut ;

1. Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sudah efektif dilihat dari faktor peraturan hukum dan faktor penegak hukumnya akan tetapi beberapa faktor kurang efektif yaitu ;
  - a. Faktor sarana dan prasarana karena masih kurangnya anggaran untuk memeriksa seluruh daerah Jawa Timur.
  - b. Faktor kebudayaan karena pelanggaran yang dilakukan oleh stasiun radio swasta dari tahun ke tahun sudah menjadi kebiasaan.
  - c. Faktor masyarakat karena kurang kepeduliannya masyarakat akan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga stasiun radio swasta.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 34 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran sebagai berikut;

- a. Kurangnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah untuk Komisi Penyiaran Daerah Jawa Timur untuk melakukan pengawasan lebih untuk seluruh wilayah Jawa Timur.
- b. Kurangnya kerja sama antara Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dengan KOMINFO untuk melakukan penyelidikan stasiun radio swasta yang tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran atau izin penyelenggaraan penyiarannya hanya beberapa tahun saja.
- c. Belum adanya sanksi apapun yang diberikan kepada stasiun radio swasta yang tidak mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran ataupun stasiun radio swasta yang izinnya hanya beberapa tahun saja. Jika tidak ada sanksi maka tidak akan menimbulkan efek jera bagi yang melanggar
- d. Kurang kesadaran dan kepedulian masyarakat akan pentingnya terhadap stasiun radio di daerahnya yang melanggar peraturan karena kebudayaan masyarakat sendiri.
- e. Stasiun radio swasta yang tetap melakukan siaran tanpa memiliki izin penyelenggaraan penyiaran





tanpa pengetahuan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur dan KOMINFO.

## **B. SARAN**

Saran yang diberikan penulis terkait hasil dan pembahasan peneliti sebagai berikut ;

1. Seharusnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur mengoptimalkan jalinan kerjasama dengan KOMINFO untuk mengawasi dan memeriksa agar dapat mengawasi lembaga stasiun radio swasta yang belum punya mempunyai izin penyelenggaraan penyiaran di wilayah Jawa Timur.
2. Seharusnya adanya pengaduan dari masyarakat sangat diperlukan untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi seperti bentuk isi siaran dan perizinan
3. Seharusnya anggaran dana dan perlengkapan yang dimiliki oleh KPID ditambah dari pemerintah mengingat luasnya wilayah Jawa Timur tidak semua terjangkau oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur, dalam hal pengawasan penyelenggaraan penyiaran dan masalah seperti minimnya alat dan perlengkapan bagi Komisi

Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur untuk melakukan menyeluruh di wilayah Jawa Timur.





## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011,

Dominick, Joseph, *The Dynamics of Mass Communication Media in The Digital Age*, Seventh Edition, Boston, 2002, hlm 119

Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 201.

Mardjono Rekosdipuro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Jakarta, 1994, hlm.76

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 196-197

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 44.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm, 348

Sondang P. Siagan, **Administrasi Pembangunan**, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm 117

Sukardi, **Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya**, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 54.

Soekanto, Soerjono, **Teori Efektifitas Dalam Hukum**, Sinar Grafika, Semarang, 2000, hlm 14

Y. Sri Pudiyatmoko, **Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan**, Grasindo, Jakarta, 2009, hlm.17-18

Zainudin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,

Zainuddin Ali, **Sosiologi Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007 hlm. 62

#### **UNDANG-UNDANG :**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 18

Tahun 2016 Tentang Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

Peraturan Pemerintah No.11 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran

Lembaga Penyiaran Publik

**INTERNET :**

Lina, herlina, 2014, radio frekuensi

<https://lherlina.wordpress.com/2014/11/28/radio-frekuensi/> (28 November 2014)

Lilie Budiastuti Wiratmo,

<http://jurnal.upnyk.ac.id/index.php/komunikasi/article/download/1443/1317> (12 Februari 2018)

